

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini semakin mendesak mengingat Indonesia menghadapi tantangan kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan data terbaru, akses internet di rumah tangga perdesaan hanya mencapai 26,3% dibandingkan dengan 48,5% di wilayah perkotaan (Hadi, 2018). Kesenjangan ini menciptakan hambatan struktural dalam akses pelayanan publik digital, khususnya bagi masyarakat perdesaan yang secara geografis terpisah dari pusat-pusat pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Aprilina et al., 2025). Namun, implementasi SPBE menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Data menunjukkan bahwa 73,7 juta orang Indonesia atau 26,3% dari total populasi masih belum menggunakan internet, dengan lebih dari 12.500 desa dan 104.000 sekolah di seluruh Indonesia belum memiliki akses internet (CIPS, 2022).

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang paling krusial bagi masyarakat karena dokumen kependudukan menjadi prasyarat untuk mengakses layanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial. Sebelum era digitalisasi, masyarakat harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan. Kondisi ini menciptakan beban ekonomi dan sosial yang substansial, terutama bagi masyarakat perdesaan yang harus mengeluarkan biaya transportasi rata-rata Rp110.000 per dokumen, kehilangan waktu produktif rata-rata satu hingga dua hari kerja, dan seringkali harus melakukan kunjungan berulang akibat ketidaklengkapan persyaratan (Disdukcapil Jepara, 2025).

Kondisi inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Pelayanan administrasi kependudukan yang sentralistik tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga melahirkan persoalan politik yang lebih dalam. Ketika masyarakat harus bergantung pada satu titik layanan yang jauh secara geografis, muncul celah bagi praktik percaloan informal, ketidaktransparanan birokrasi, dan distribusi akses yang tidak merata. Kondisi ini pada dasarnya adalah persoalan relasi kekuasaan antara negara dan warga yang belum terselesaikan melalui mekanisme pelayanan konvensional.

Dalam konteks inilah inovasi Kios Adminduk di Kabupaten Jepara menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif proses politik yang melatarbelakangi dan

menyertai transformasi digital tersebut. Program yang diluncurkan pada 12 Juni 2023 ini berhasil mentransformasi pola pelayanan administrasi kependudukan dari sentralisasi di kantor Disdukcapil menjadi desentralisasi hingga tingkat desa. Data kinerja menunjukkan pencapaian yang signifikan: ekspansi dari 60 desa pada fase awal menjadi 180 desa pada Desember 2025, melayani seluruh 8 kecamatan dengan total penerbitan 67.732 dokumen yang terdiri dari KTP Elektronik sebanyak 14.437 dokumen, Kartu Keluarga sebanyak 25.133 dokumen, akta kelahiran sebanyak 11.175 dokumen, dan dokumen lainnya (Disdukcapil Jepara, 2025).

Gambar 1. Capaian Desa Program Kos Adminduk per Desember 2025



(Sumber: Website Resmi Disdukcapil Kabupaten Jepara)

Namun demikian, angka-angka keberhasilan tersebut tidak lahir begitu saja. Di balik setiap dokumen yang diterbitkan, terdapat proses politik yang kompleks: negosiasi antara pemerintah desa dan Disdukcapil, pengelolaan resistensi birokrasi di tingkat lokal, pembangunan

kepercayaan antar aktor yang berlangsung secara bertahap, dan kolaborasi multi-level yang tidak selalu berjalan mulus. Keberhasilan Kios Adminduk, sebagaimana akan dianalisis dalam penelitian ini, adalah keberhasilan politik sebelum menjadi keberhasilan teknologi.

Fenomena ini menantang asumsi umum bahwa transformasi digital pelayanan publik adalah persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan investasi infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia semata. Penelitian di berbagai konteks menunjukkan bahwa inovasi digital di sektor publik selalu berinteraksi dengan struktur institusional yang ada, relasi kekuasaan antar aktor, dan kapasitas organisasional yang tidak merata (Fountain, 2001). Kios Adminduk di Kabupaten Jepara menghadirkan laboratorium empiris yang kaya untuk menguji proposisi-proposisi teoritis ini dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Lebih dari itu, implementasi Kios Adminduk juga menghadirkan dinamika kolaborasi antar level pemerintahan yang menarik secara teoritis. Program ini melibatkan setidaknya tiga level aktor utama yaitu Disdukcapil di level kabupaten, kecamatan sebagai penghubung koordinatif, dan pemerintah desa sebagai pelaksana di garis terdepan. Kualitas kolaborasi antar level ini, sebagaimana ditekankan oleh Ansell dan Gash (2008), sangat menentukan apakah program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pertanyaan tentang bagaimana kepercayaan dibangun, bagaimana konflik dikelola, dan bagaimana komitmen dipertahankan menjadi pertanyaan yang relevan secara teoritis maupun praktis.

Pada saat yang sama, implementasi Kios Adminduk juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Dari sisi teknis, infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh desa menciptakan kerentanan operasional. Dari sisi administratif, kompleksitas regulasi dan koordinasi lintas level pemerintahan membuka potensi miskomunikasi dan inkonsistensi pelayanan. Dari sisi sosial, disparitas literasi digital dan sosialisasi yang belum merata menyebabkan tidak seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses manfaat program secara optimal. Ketiga tantangan ini, sebagaimana akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini, bukan sekadar hambatan teknis melainkan cerminan dari persoalan politik yang lebih mendasar tentang bagaimana negara hadir melayani warganya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan menganalisis secara sistematis proses politik yang melatarbelakangi keberhasilan implementasi Kios Adminduk serta tantangan yang dihadapinya, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk replikasi program serupa di daerah lain. Mengingat heterogenitas karakteristik daerah di Indonesia, pemahaman mendalam tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan keberhasilan implementasi menjadi krusial untuk memastikan efektivitas investasi pemerintah dalam program digitalisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kompleksitas fenomena transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana proses politik transformasi digital Kios Adminduk di tingkat desa di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana dampak proses politik transformasi digital Kios Adminduk terhadap efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa di Kabupaten Jepara?
3. Apa saja tantangan teknis, administratif, dan sosial yang dihadapi layanan Kios Adminduk di desa-desa dan solusinya dari sudut pandang proses politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses politik transformasi digital Kios Adminduk di Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis dampak proses politik transformasi digital Kios Adminduk terhadap efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa di Kabupaten Jepara, meliputi aspek pengambilan keputusan politik, negosiasi antar-aktor, mobilisasi sumber daya, dan redistribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan layanan.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan teknis, administratif, dan sosial dalam implementasi Kios Adminduk serta strategi politik yang dikembangkan oleh berbagai stakeholder untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk pengelolaan resistensi, pembangunan koalisi, dan konstruksi legitimasi politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Pertama, memperkaya literatur tentang proses politik transformasi digital dalam administrasi publik dengan fokus khusus pada dinamika politik desentralisasi pelayanan hingga tingkat desa yang masih jarang diteliti dalam konteks Indonesia. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan literatur tentang bagaimana keputusan politik dibuat, bagaimana negosiasi antar-tingkat pemerintahan berlangsung, dan bagaimana legitimasi politik dibangun dalam konteks inovasi pelayanan publik digital.

Kedua, mengembangkan pemahaman tentang penerapan teori politik inovasi digital dalam sektor publik, khususnya konsep *technology enactment* (Fountain, 2001) dan *politics behind the screen* (Meijer & Bekkers, 2015), dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, relasi kekuasaan, dan proses politik membentuk cara teknologi digital diadopsi dan diimplementasikan di tingkat lokal.

Ketiga, berkontribusi pada pengembangan teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) melalui analisis empiris tentang proses politik kolaborasi multi-level governance dalam transformasi digital pelayanan publik. Penelitian ini akan mengeksplorasi mekanisme deliberasi, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama yang memungkinkan keberhasilan co-creation of public value dalam era digital, serta bagaimana distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan dinegosiasikan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pertama, memberikan masukan strategis bagi Disdukcapil Kabupaten Jepara dan kepemimpinan politik daerah untuk optimalisasi program Kios Adminduk berdasarkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik yang mendukung atau menghambat implementasi. Rekomendasi akan mencakup strategi untuk memperkuat koalisi pendukung, mengelola resistensi stakeholder, dan mempertahankan legitimasi politik program.

Kedua, menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang berencana mengimplementasikan inovasi serupa dengan menyediakan pembelajaran tentang proses politik yang perlu dikelola, termasuk: bagaimana membangun dukungan politik, bagaimana menegosiasikan alokasi anggaran dengan DPRD, bagaimana mengelola koordinasi lintas-SKPD, dan bagaimana

membangun koalisi dengan pemerintah desa. Pembelajaran ini akan membantu daerah lain mengantisipasi tantangan politik dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks politik lokal mereka.

Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Dalam Negeri dan pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam pengembangan kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang sensitif terhadap realitas politik lokal. Rekomendasi akan mencakup aspek desain kebijakan yang memfasilitasi proses politik yang kondusif, mekanisme insentif politik bagi daerah inovator, dan strategi untuk mengelola resistensi politik terhadap perubahan dalam birokrasi pemerintahan..

1.5. *Literature Review*

Transformasi Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi fokus kajian akademis yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Literatur awal cenderung berfokus pada aspek teknologi dan infrastruktur, namun perkembangan terkini menunjukkan perhatian yang lebih besar pada dimensi organisasional, sosial, dan terutama politik dari digitalisasi pemerintahan (Mergel et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang digitalisasi pelayanan publik telah mengalami evolusi dari pendekatan *techno-centric* menuju perspektif yang lebih holistik dan kontekstual, meskipun dimensi proses politik dalam transformasi digital masih relatif kurang mendapat perhatian.

Fountain (2001) dalam karyanya yang seminal *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change* memberikan fondasi teoretis penting untuk memahami dimensi politik transformasi digital pemerintahan. Konsep *technology enactment* yang dikembangkan Fountain menjelaskan bahwa teknologi dalam organisasi pemerintahan tidak bekerja secara deterministik, melainkan dibentuk (*enacted*) oleh struktur kelembagaan, relasi kekuasaan, dan proses politik yang ada. Argumen ini menantang asumsi bahwa teknologi digital secara otomatis akan meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menekankan pentingnya memahami bagaimana aktor-aktor politik membentuk cara teknologi diadopsi dan diimplementasikan. Relevansi teori ini terbukti dalam temuan penelitian ini, di mana Kios Adminduk tidak hadir secara seragam di seluruh desa melainkan dibentuk ulang oleh konteks politik lokal masing-masing, mulai dari inovasi protokol WhatsApp di Desa Kuwasen hingga pemanfaatan jaringan tokoh agama di Desa Troso.

Meijer dan Bekkers (2015) mengembangkan konsep *politics behind the screen* untuk menjelaskan bahwa keputusan-keputusan teknis dalam desain dan implementasi sistem e-government seringkali mencerminkan pilihan-pilihan politik tentang distribusi akses, kontrol, dan kekuasaan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa transformasi digital bukan proses teknis yang netral, melainkan arena kontestasi politik di mana berbagai aktor memperebutkan pengaruh atas bagaimana layanan publik digital dirancang dan diimplementasikan. Perspektif ini sangat relevan untuk memahami temuan penelitian ini, di mana keputusan tentang

pemilihan operator, alokasi anggaran, dan mekanisme koordinasi mencerminkan dinamika relasi kekuasaan lokal yang khas di masing-masing desa.

Mergel (2016) mengidentifikasi tiga tantangan politik utama yang dihadapi inovasi digital di sektor publik. Pertama, resistensi birokrasi yang muncul karena inovasi digital mengancam rutinitas yang sudah mapan, struktur kekuasaan yang ada, dan kompetensi yang dimiliki pegawai. Kedua, keterbatasan kapasitas organisasi untuk mengelola perubahan, yang tidak hanya mencakup kapasitas teknis tetapi juga kapasitas politik untuk membangun koalisi pendukung dan mengelola konflik. Ketiga, kesulitan membangun koalisi pendukung yang cukup kuat untuk melindungi inovasi dari tekanan politik jangka pendek dan perubahan kepemimpinan.

Ketiga tantangan ini terkonfirmasi secara empiris dalam penelitian ini, namun dengan nuansa yang memodifikasi proposisi Mergel. Resistensi birokrasi yang ditemukan di lapangan lebih bersifat struktural dan tersembunyi daripada formal dan eksplisit, hadir dalam bentuk inersia kapasitas SDM dan perilaku oportunistik individual seperti kasus pelanggaran operator di Desa Krapyak. Kapasitas politik terbukti berevolusi dari mekanisme *top-down* pada fase awal menjadi *bottom-up* setelah legitimasi program terbukti, sebuah dinamika yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka Mergel.

Bannister dan Connolly (2014) berpendapat bahwa transformasi digital dalam pemerintahan melibatkan redistribusi kekuasaan, perubahan dalam akuntabilitas, dan negosiasi ulang hubungan antara negara dan warga negara. Teknologi digital tidak hanya mengubah *how* pelayanan diberikan, tetapi juga *who* memiliki kekuasaan dalam sistem pelayanan dan *to whom* aktor-aktor tersebut bertanggung jawab. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi proposisi ini secara empiris: digitalisasi melalui Kios Adminduk memutus rantai percaloan yang sebelumnya menguntungkan oknum tertentu dan menggeser kontrol data ke mekanisme yang transparan dan terverifikasi secara elektronik.

Cordella dan Tempini (2015) menekankan bahwa desentralisasi pelayanan melalui teknologi digital memerlukan redistribusi kekuasaan dari pusat ke unit-unit lokal yang seringkali menghadapi resistensi dari aktor-aktor yang kehilangan kontrol. Proses redistribusi kekuasaan ini tidak terjadi secara otomatis melalui adopsi teknologi, melainkan memerlukan keputusan politik eksplisit dan negosiasi berkelanjutan antara berbagai tingkat pemerintahan. Temuan penelitian ini memperluas argumen ini dengan menunjukkan bahwa integritas aktor dalam proses redistribusi kekuasaan tersebut lebih determinan daripada kapasitas teknis semata.

Ansell dan Gash (2008) memberikan kerangka untuk memahami proses politik kolaborasi multi-stakeholder dalam transformasi digital pelayanan publik. Mereka mengidentifikasi bahwa *collaborative governance* yang berhasil memerlukan empat elemen kunci: dialog tatap

muka yang memungkinkan negosiasi kepentingan secara langsung, pembangunan kepercayaan melalui interaksi berulang dan demonstrasi komitmen, komitmen pada proses yang menunjukkan kesediaan berbagai pihak untuk terlibat dalam deliberasi jangka panjang, dan pemahaman bersama tentang masalah dan solusi yang dikembangkan melalui proses deliberatif.

Penelitian ini mengkonfirmasi relevansi kerangka Ansell dan Gash (2008) sekaligus memberikan modifikasi empiris yang penting. Elemen dialog tatap muka yang ditekankan oleh Ansell dan Gash terbukti dalam praktik kepemimpinan fasilitatif kepala desa yang menggunakan pendekatan silaturahmi informal sebelum forum resmi. Namun temuan lapangan juga menunjukkan bahwa grup WhatsApp operator se-kabupaten telah menggantikan fungsi dialog tatap muka secara efektif dalam koordinasi teknis operasional sehari-hari. Ini adalah modifikasi kontekstual yang penting dari teori Ansell dan Gash dalam era komunikasi digital.

Emerson et al. (2012) mengembangkan kerangka *collaborative governance* yang lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi *system context*, *drivers*, *collaborative governance regime*, dan *impacts and adaptation*. Mereka menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh konteks politik-institusional, termasuk struktur kekuasaan yang ada, kerangka hukum dan kebijakan, serta karakteristik politik lokal. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi proposisi ini: mekanisme pakta integritas antara operator desa dan

Disdukcapil berfungsi sebagai pengikat komitmen formal yang menentukan kualitas *collaborative governance regime* di masing-masing desa.

Smoke (2015) mengidentifikasi bahwa desentralisasi pelayanan memerlukan tidak hanya transfer fungsi administratif, tetapi juga transfer kekuasaan politik, fiskal, dan administratif yang seringkali menghadapi resistensi dari aktor-aktor di tingkat pusat yang enggan melepaskan kontrol. Dalam konteks transformasi digital, desentralisasi pelayanan memiliki kompleksitas tambahan karena melibatkan pertanyaan tentang standardisasi versus fleksibilitas lokal, kontrol kualitas versus otonomi implementasi, dan efisiensi sistem terpusat versus responsivitas lokal (Bekkers & Homburg, 2007).

Kios Adminduk Jepara menawarkan model hibrida yang menarik di mana teknologi digital memungkinkan desentralisasi geografis layanan sambil mempertahankan standardisasi dan kontrol kualitas dari pusat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model hibrida ini tidak terwujud secara otomatis, melainkan melalui proses negosiasi politik yang cermat antara Disdukcapil dan pemerintah desa, yang dalam beberapa kasus seperti Desa Krapyak sempat mengalami krisis kepercayaan sebelum akhirnya dipulihkan melalui mediasi institusional.

Bekkers dan Homburg (2007) menjelaskan bahwa kontrol atas data dan informasi merupakan sumber kekuasaan dalam organisasi pemerintahan, sehingga desentralisasi sistem informasi seringkali

menghadapi resistensi dari aktor-aktor yang merasa kehilangan kontrol atas domain informasi yang strategis. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi proposisi ini sekaligus menambahkan dimensi baru: desentralisasi kontrol data melalui Kios Adminduk justru terbukti meningkatkan transparansi dan mengeliminasi praktik pungutan liar, sehingga resistensi yang muncul lebih banyak bersifat individual dan oportunistik daripada institusional.

Weerakkody et al. (2011) mengidentifikasi bahwa dukungan kepemimpinan politik merupakan faktor kritis dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Kepemimpinan politik tidak hanya memberikan legitimasi pada inisiatif inovasi, tetapi juga melindungi program dari resistensi birokrasi dan tekanan politik jangka pendek. Bertot et al. (2016) mengembangkan konsep *digital government leadership* yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas politik implementasi, termasuk kemampuan mengkomunikasikan visi transformasi digital, memobilisasi sumber daya politik, membangun koalisi lintas organisasi, dan mengelola ekspektasi publik.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi proposisi tentang sentralitas kepemimpinan sekaligus memperkayanya dengan dimensi kontekstual yang khas. Kepemimpinan yang paling efektif dalam implementasi Kios Adminduk bukan kepemimpinan yang mengandalkan otoritas formal, melainkan kepemimpinan fasilitatif yang mampu membangun kepercayaan melalui pendekatan kultural yang kontekstual. Kepala Desa

Kuwasen yang menggunakan silaturahmi informal sebagai strategi pramusyawarah dan Kepala Desa Troso yang memanfaatkan jaringan tokoh agama NU sebagai jembatan kepercayaan masyarakat memberikan bukti empiris bahwa efektivitas kepemimpinan dalam transformasi digital di tingkat desa sangat bergantung pada kemampuan pemimpin membaca dan merespons konteks sosial-budaya lokal.

Gil-Garcia et al. (2018) mengidentifikasi pembangunan legitimasi melalui demonstrasi manfaat nyata bagi publik sebagai salah satu dimensi proses politik yang paling krusial dalam transformasi digital pemerintahan. Legitimasi program inovasi digital tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus dibangun dan dipertahankan melalui proses yang berkelanjutan.

Mergel (2016) membedakan tiga dimensi legitimasi dalam inovasi digital publik: legitimasi *input* yang bersumber dari partisipasi masyarakat dalam desain program, legitimasi *throughput* yang bersumber dari transparansi proses implementasi, dan legitimasi *output* yang bersumber dari demonstrasi hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam teorinya, Mergel menekankan bahwa ketiga dimensi ini idealnya hadir secara bersamaan untuk membangun legitimasi yang kokoh.

Namun temuan penelitian ini menghasilkan modifikasi teoritis yang penting terhadap proposisi Mergel tersebut. Kios Adminduk di Kabupaten Jepara memiliki profil legitimasi yang asimetris: lemah pada dimensi legitimasi *input* karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses

desain program, namun sangat kuat pada dimensi legitimasi *output* dan *throughput* karena hasil nyata langsung dirasakan masyarakat dan transparansi biaya terjamin secara digital. Meskipun demikian, program ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat desa Indonesia yang memiliki riwayat pengalaman negatif dengan birokrasi konvensional, legitimasi *output* dan *throughput* memiliki daya determinasi yang lebih kuat daripada legitimasi *input* dalam membangun penerimaan program inovasi digital publik.

Review terhadap literatur yang ada mengidentifikasi beberapa gap penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, sebagian besar studi tentang digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek teknis-manajerial, dengan perhatian terbatas pada dinamika proses politik yang membentuk keberhasilan atau kegagalan implementasi (Aprilina et al., 2025). Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana keputusan politik dibuat, bagaimana negosiasi antar aktor berlangsung, dan bagaimana legitimasi politik dibangun dalam konteks implementasi Kios Adminduk.

Kedua, fokus geografis penelitian masih didominasi oleh implementasi di tingkat nasional atau kabupaten, dengan sangat sedikit perhatian pada dinamika proses politik di tingkat desa yang memiliki karakteristik unik tersendiri (Wicaksono & Ramadhani, 2022; Ridwan & Wargadinata, 2025). Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menempatkan pemerintah desa sebagai unit analisis utama dalam kerangka *embedded single-case study*.

Ketiga, literatur tentang *collaborative governance* dalam transformasi digital masih sangat terbatas dalam konteks Indonesia, khususnya yang melibatkan desentralisasi hingga tingkat desa dalam sistem pemerintahan multi-level (Emerson et al., 2012). Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis proses kolaborasi antara Disdukcapil, kecamatan, dan pemerintah desa sebagai dimensi analitis yang sentral.

Keempat, terdapat gap metodologis berupa kurangnya studi longitudinal yang dapat menangkap dinamika proses politik dari waktu ke waktu (Pratama et al., 2024). Penelitian ini tidak mengklaim mengisi gap longitudinal tersebut secara penuh karena dilakukan pada satu titik waktu. Namun melalui rekonstruksi retrospektif dari narasi informan yang mencakup perjalanan program sejak Juni 2023 hingga Februari 2026, penelitian ini memberikan kontribusi parsial terhadap pemahaman dinamika temporal implementasi. Gap longitudinal yang sesungguhnya tetap terbuka dan menjadi salah satu agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan.

Kelima, terdapat gap teoretis dalam dialog antara teori teknologi dan teori politik organisasi yang belum sepenuhnya terjembatani dalam literatur yang ada (Aprilina et al., 2025). Penelitian ini mengisi gap tersebut melalui integrasi tiga kerangka teoritis secara simultan yakni *Technology Enactment* (Fountain, 2001), *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), dan *Politik Inovasi Digital* (Mergel, 2016), yang

bersama-sama memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses politik transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa.

1.6. Kerangka Teoritis

Kompleksitas fenomena transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui Kios Adminduk memerlukan pendekatan teoretis yang integratif dengan fokus pada proses politik yang membentuk keberhasilan implementasi. Penelitian ini menggunakan sintesis tiga kerangka teoretis yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman holistik tentang dinamika proses politik, negosiasi antar-aktor, dan mekanisme kolaborasi dalam konteks transformasi digital pelayanan publik.

1.6.1. Teori Technology Enactment - Fountain (2001)

Teori technology enactment dari Fountain (2001) dalam karya *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change* menjadi fondasi teoretis utama dalam penelitian ini karena kemampuannya menjelaskan bagaimana teknologi dibentuk oleh proses politik dan struktur kelembagaan dalam organisasi pemerintahan. Fountain berpendapat bahwa teknologi informasi tidak bekerja secara deterministik dalam organisasi publik, melainkan di-enact (diwujudkan/dibentuk) melalui interaksi dengan struktur organisasi, norma institusional, dan dinamika politik yang ada.

Konsep kunci dalam teori ini adalah perbedaan antara *objective technology* (teknologi sebagai artefak teknis) dan *enacted technology*

(teknologi sebagaimana dipersepsikan, diinterpretasikan, dan digunakan dalam praktik organisasional). Dalam konteks Kios Adminduk, teknologi yang sama (sistem informasi administrasi kependudukan) dapat di-enact secara berbeda di berbagai desa tergantung pada struktur kekuasaan lokal, kapasitas institusional, dan proses politik yang berlangsung.

Fountain (2001) mengidentifikasi bahwa proses enactment teknologi dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- (a) struktur institusional yang mencakup aturan formal dan informal, rutinitas organisasi, dan pembagian kewenangan;
- (b) relasi kekuasaan antara berbagai aktor yang menentukan siapa yang memiliki kontrol atas teknologi dan data; dan
- (c) kapasitas organisasional dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknis. Ketiga faktor ini tidak statis, melainkan dinegosiasikan secara politik dalam proses implementasi teknologi.

Dalam konteks transformasi digital Kios Adminduk, teori ini membantu memahami bagaimana keputusan politik tentang desain sistem, alokasi sumber daya, pemilihan lokasi implementasi, dan penetapan operator membentuk cara teknologi bekerja dalam praktik. Proses politik tidak hanya terjadi dalam fase adopsi keputusan, tetapi berlanjut dalam fase implementasi di mana berbagai aktor di tingkat kabupaten dan desa terus menegosiasikan bagaimana teknologi digunakan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana data dikelola.

Aplikasi teori Fountain dalam konteks Indonesia memerlukan perhatian pada karakteristik spesifik birokrasi Indonesia, termasuk: hubungan patron-klien yang masih kuat, pentingnya hubungan personal dalam koordinasi antar-lembaga, dan peran kepemimpinan informal dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana teknologi digital di-enact dalam konteks lokal yang spesifik.

1.6.2. Teori Collaborative Governance - Ansell dan Gash (2008)

Kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dalam artikel "Collaborative governance in theory and practice" memberikan perspektif untuk memahami proses politik kolaborasi multi-stakeholder dalam transformasi digital pelayanan kependudukan. Teori ini mendefinisikan collaborative governance sebagai "pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan stakeholder non-negara dalam proses pembuatan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik" (Ansell & Gash, 2008, hal. 544).

Model collaborative governance Ansell dan Gash mengidentifikasi empat variabel kunci yang membentuk proses kolaborasi:

- (1) kondisi awal (starting conditions) yang mencakup ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya antar stakeholder, sejarah konflik atau kerjasama, dan insentif untuk berpartisipasi;

- (2) desain institusional yang mencakup aturan main dasar, transparansi proses, dan inklusivitas;
- (3) kepemimpinan fasilitatif yang memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik; dan
- (4) proses kolaboratif yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil antara.

Dalam konteks Kios Adminduk, collaborative governance terjadi pada berbagai tingkat: kolaborasi antara Disdukcapil dengan pemerintah desa dalam implementasi program, kolaborasi antara Disdukcapil dengan SKPD lain (Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda) dalam penyediaan infrastruktur dan anggaran, serta kolaborasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Setiap tingkat kolaborasi memiliki dinamika politik yang berbeda yang perlu dipahami.

Kondisi awal yang penting dalam kasus Kios Adminduk mencakup: ketimpangan kapasitas teknis dan sumber daya antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, pengalaman kolaborasi sebelumnya dalam program-program lain, dan insentif bagi pemerintah desa untuk berpartisipasi (mendekatkan layanan ke masyarakat versus beban kerja tambahan). Desain institusional mencakup mekanisme koordinasi formal melalui rapat koordinasi berkala, sistem pelaporan, dan mekanisme evaluasi kinerja.

Kepemimpinan fasilitatif dalam konteks Kios Adminduk dapat berasal dari Kepala Disdukcapil yang memfasilitasi dialog dengan kepala desa, atau dari Bupati yang memberikan dukungan politik dan melindungi program dari resistensi. Proses kolaboratif melibatkan negosiasi berkelanjutan tentang pembagian tanggung jawab, penyelesaian masalah teknis, dan adaptasi program berdasarkan pembelajaran dari implementasi.

Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa collaborative governance adalah proses siklus (cyclical process) di mana hasil antara dari satu fase kolaborasi menjadi input untuk fase berikutnya. Kepercayaan yang dibangun dalam fase awal implementasi memfasilitasi kolaborasi yang lebih dalam dalam fase ekspansi. Pemahaman bersama tentang masalah dan solusi yang dikembangkan melalui dialog berkelanjutan menjadi fondasi untuk adaptasi dan inovasi lebih lanjut.

Perdebatan teoretis dalam aplikasi collaborative governance berkaitan dengan apakah kolaborasi selalu menghasilkan outcome yang lebih baik dibandingkan dengan mode governance yang lain. Emerson dan Nabatchi (2015) berargumen bahwa efektivitas collaborative governance sangat kontekstual dan bergantung pada karakteristik masalah, konfigurasi stakeholder, dan kapasitas untuk kolaborasi. Dalam konteks Kios Adminduk, pertanyaan krusial adalah: dalam kondisi apa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan desa lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan top-down atau delegasi penuh.

1.6.3. Teori Politik Inovasi Digital dalam Sektor Publik - Mergel (2016)

Kerangka politik inovasi digital dari Mergel (2016) dalam artikel "Agile innovation management in government: A research agenda" memberikan perspektif spesifik tentang tantangan politik yang dihadapi inovasi digital di sektor publik dan strategi untuk mengatasinya. Mergel mengidentifikasi bahwa inovasi digital dalam pemerintahan menghadapi tiga tantangan politik utama yang berbeda dari inovasi di sektor swasta:

- (1) resistensi birokrasi yang berakar pada ancaman terhadap rutinitas yang mapan dan distribusi kekuasaan yang ada;
- (2) keterbatasan kapasitas tidak hanya dalam hal teknis tetapi terutama dalam hal kapasitas politik untuk membangun koalisi dan mengelola konflik; dan
- (3) kesulitan membangun legitimasi karena manfaat inovasi digital seringkali tidak langsung terlihat dan memerlukan waktu untuk terwujud.

Resistensi birokrasi dalam konteks transformasi digital bukan sekadar resistensi terhadap perubahan teknologi, melainkan resistensi terhadap redistribusi kekuasaan dan kontrol yang dibawa oleh teknologi digital. Dalam kasus Kios Adminduk, desentralisasi pelayanan ke tingkat desa dapat dipersepsikan oleh pegawai di Disdukcapil sebagai ancaman terhadap peran mereka, atau oleh SKPD lain sebagai pergeseran kontrol atas domain pelayanan yang strategis. Mergel (2016) mengidentifikasi bahwa mengelola resistensi memerlukan strategi politik yang mencakup:

membangun koalisi pendukung di berbagai tingkat organisasi, mengkomunikasikan manfaat inovasi secara jelas, dan melibatkan potensial resistor dalam proses desain dan implementasi.

Keterbatasan kapasitas politik merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola proses politik yang kompleks dalam implementasi inovasi. Ini mencakup kemampuan untuk: menegosiasikan alokasi anggaran dengan DPRD, membangun kerjasama dengan SKPD lain yang mengendalikan sumber daya kritis (seperti infrastruktur IT), mengelola ekspektasi berbagai stakeholder, dan mempertahankan momentum politik dalam implementasi jangka panjang. Mergel menekankan bahwa kapasitas politik ini seringkali lebih krusial daripada kapasitas teknis dalam menentukan keberhasilan inovasi digital.

Pembangunan legitimasi politik inovasi digital memerlukan strategi komunikasi yang efektif dan demonstrasi manfaat nyata. Mergel (2016) mengidentifikasi bahwa legitimasi dapat dibangun melalui tiga jalur:

- (1) legitimasi input yang berasal dari proses partisipatif dalam desain dan implementasi;
- (2) legitimasi throughput yang berasal dari transparansi dan akuntabilitas proses implementasi; dan
- (3) legitimasi output yang berasal dari demonstrasi hasil nyata dalam bentuk peningkatan kualitas layanan atau efisiensi.

Dalam konteks Kios Adminduk, ketiga jalur legitimasi ini

dapat diidentifikasi dalam: keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam perancangan program (input), transparansi dalam pelaporan kinerja (throughput), dan pencapaian target cakupan layanan dan kepuasan masyarakat (output).

Mergel (2016) juga mengembangkan konsep agile innovation management yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam implementasi inovasi digital. Berbeda dengan model implementasi tradisional yang linear dan top-down, agile innovation menekankan siklus iteratif dari eksperimen, pembelajaran, dan adaptasi. Pendekatan ini memerlukan kapasitas politik untuk menoleransi kegagalan jangka pendek, belajar dari kesalahan, dan mengadaptasi strategi berdasarkan feedback dari implementasi.

Dalam konteks Kios Adminduk, pendekatan agile dapat dilihat dalam strategi ekspansi bertahap dari 60 desa pilot ke 131 desa, yang memungkinkan pembelajaran dari implementasi awal sebelum scaling up. Namun, pendekatan ini juga menciptakan tantangan politik karena ekspektasi stakeholder untuk hasil cepat versus kebutuhan untuk pembelajaran dan adaptasi yang memerlukan waktu.

Perdebatan teoretis dalam kerangka Mergel berkaitan dengan ketegangan antara agile innovation yang menekankan fleksibilitas dan eksperimentasi, dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan prediktabilitas. Pertanyaan krusial adalah: bagaimana organisasi publik dapat menyeimbangkan

kebutuhan untuk eksperimentasi dan pembelajaran dengan tuntutan akuntabilitas publik dan kontrol politik?

1.6.4. Integrasi Kerangka Teoretis

Ketiga kerangka teoretis di atas diintegrasikan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang proses politik transformasi digital Kios Adminduk. Teori *technology enactment* Fountain memberikan lensa untuk memahami bagaimana teknologi dibentuk oleh struktur institusional dan proses politik. Teori *collaborative governance* Ansell dan Gash memberikan kerangka untuk menganalisis proses kolaborasi multi-level antara pemerintah kabupaten dan desa. Teori politik inovasi digital Mergel memberikan perspektif tentang tantangan politik spesifik yang dihadapi inovasi digital dan strategi untuk mengatasinya.

Integrasi ketiga teori ini memungkinkan analisis multi-dimensi yang mencakup:

- a) dimensi struktural-institusional;
- b) dimensi proses; dan
- c) dimensi strategis.

Kerangka terintegrasi ini juga memungkinkan analisis dinamis yang menangkap perubahan proses politik dari waktu ke waktu, dari fase inisiasi (keputusan untuk mengadopsi inovasi), fase implementasi (proses kolaborasi dan negosiasi dalam pelaksanaan), hingga fase institusionalisasi (bagaimana inovasi menjadi bagian dari rutinitas organisasi dan struktur kekuasaan yang baru).

1.7. Operasionalisasi Konsep

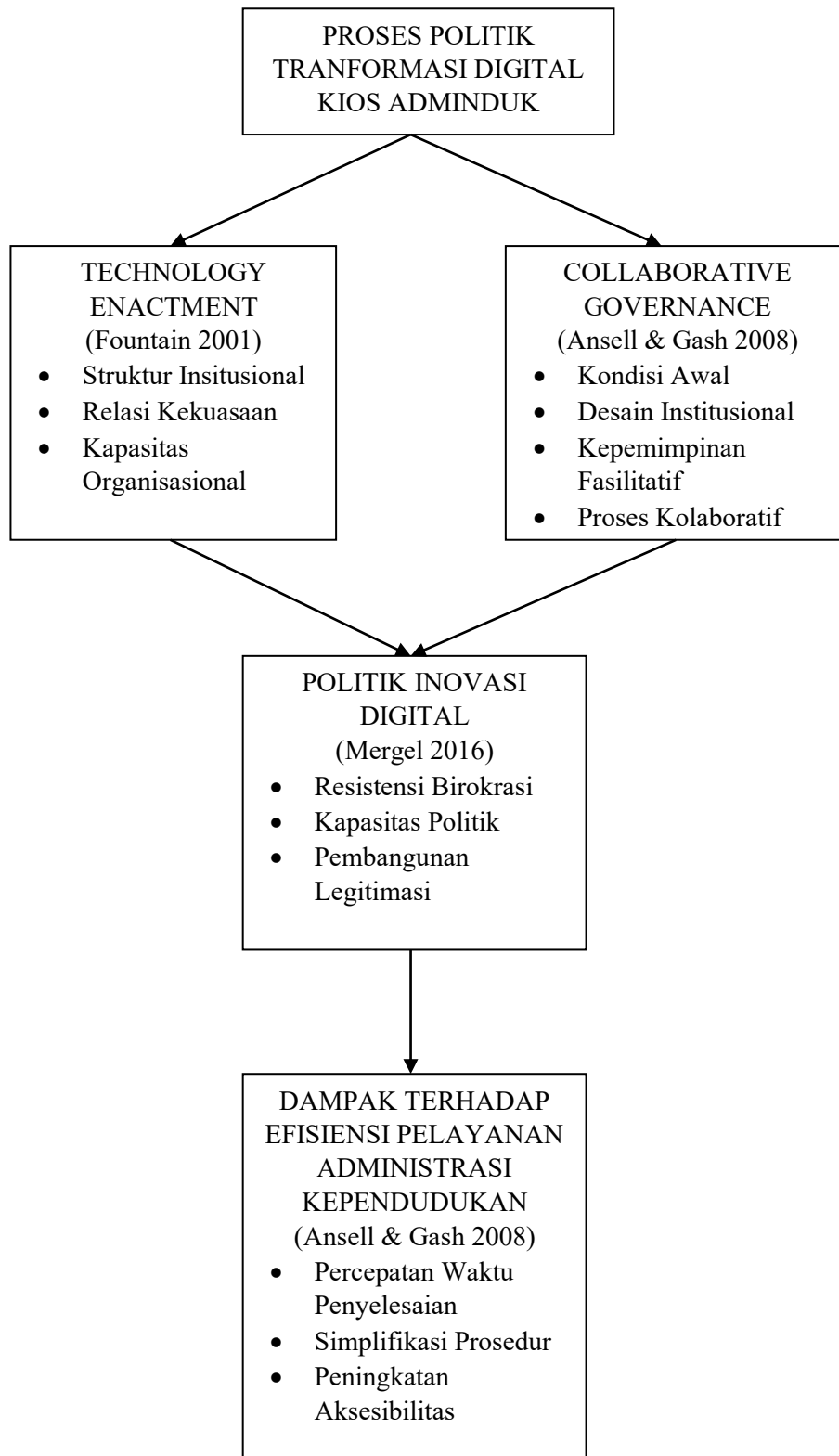
Tabel 1 Operasionalisasi Konsep

Konsep/Teori	Indikator	Pengukuran	Referensi
Technology Enactment	Struktur Institusional	• Aturan formal dan informal yang membentuk implementasi • Rutinitas organisasi yang berubah • Pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan	<i>Fountain (2001)</i>
	Relasi Kekuasaan	• Kontrol atas teknologi dan data • Distribusi akses dan otoritas • Perubahan dalam hierarki pengambilan keputusan	
	Kapasitas Organisasional	• Sumber daya manusia, keuangan, dan teknis • Kemampuan mengelola perubahan • Kapasitas politik untuk membangun koalisi	
Proses Politik Collaborative Governance	Kondisi Awal (Starting Conditions)	• Ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antar stakeholder • Sejarah konflik atau kerjasama sebelumnya • Insentif untuk berpartisipasi dalam program	<i>Ansell & Gash (2008)</i>
	Desain Institusional	• Aturan main kolaborasi • Transparansi proses pengambilan keputusan • Inklusivitas stakeholder	
	Kepemimpinan Fasilitatif	• Fasilitasi dialog antar-aktor • Pembangunan kepercayaan • Pengelolaan konflik	

Konsep/Teori	Indikator	Pengukuran	Referensi
	Proses Kolaboratif	• Dialog tatap muka antar stakeholder • Pembangunan kepercayaan berkelanjutan • Komitmen pada proses • Pengembangan pemahaman bersama	
Politik Inovasi Digital	Resistensi Birokrasi	• Bentuk resistensi terhadap perubahan • Aktor-aktor yang resisten • Strategi mengelola resistensi	<i>Mergel (2016)</i>
	Kapasitas Politik	• Kemampuan negosiasi anggaran dengan DPRD • Kemampuan membangun kerjasama lintas-SKPD • Kemampuan mengelola ekspektasi stakeholder	
	Pembangunan Legitimasi	• Legitimasi input (partisipasi dalam desain) • Legitimasi throughput (transparansi proses) • Legitimasi output (demonstrasi hasil nyata)	
Dampak terhadap Efisiensi Pelayanan	Waktu Penyelesaian Dokumen	• Rata-rata durasi penyelesaian dokumen sebelum dan sesudah implementasi • Perbandingan waktu per jenis dokumen	<i>Fountain (2001); Mergel (2016)</i>
	Simplifikasi Prosedur	• Pengurangan jumlah langkah administratif • Eliminasi persyaratan yang tidak perlu • Penyederhanaan alur pelayanan	<i>Ansell & Gash (2008)</i>
	Aksesibilitas Layanan	• Pengurangan jarak tempuh masyarakat • Pengurangan biaya akses layanan • Peningkatan ketersediaan informasi	<i>Fountain (2001)</i>
Tantangan dalam Proses Politik	Tantangan Politik-Institusional	• Resistensi dari aktor yang kehilangan kontrol • Konflik kewenangan antar-tingkat pemerintahan • Keterbatasan dukungan politik	<i>Mergel (2016); Fountain (2001)</i>
	Tantangan Negosiasi Anggaran	• Kompetisi alokasi anggaran dengan program lain • Negosiasi dengan DPRD • Keberlanjutan pendanaan	<i>Mergel (2016)</i>
	Tantangan Koordinasi	• Koordinasi lintas-SKPD	<i>Ansell & Gash (2008)</i>

Konsep/Teori	Indikator	Pengukuran	Referensi
		• Koordinasi multi-level pemerintahan • Mekanisme penyelesaian konflik	
	Tantangan Legitimasi	• Membangun dukungan publik • Mengelola ekspektasi stakeholder • Mempertahankan momentum politik	<i>Mergel (2016)</i>

1.8. Kerangka Berpikir



Bagan 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa:

1. Proses Politik Transformasi Digital menjadi inti analisis yang menghubungkan berbagai dimensi teoretis dalam memahami implementasi Kios Adminduk.
2. Technology Enactment (Fountain, 2001) menjelaskan bagaimana teknologi digital Kios Adminduk dibentuk oleh struktur institusional, relasi kekuasaan, dan kapasitas organisasional dalam konteks politik lokal.
3. Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) menganalisis proses politik kolaborasi multi-level antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam mengimplementasikan program.
4. Politik Inovasi Digital (Mergel, 2016) mengidentifikasi dinamika politik spesifik yang muncul dalam inovasi digital sektor publik, termasuk resistensi, kapasitas politik, dan pembangunan legitimasi.
5. Dampak terhadap Efisiensi Pelayanan merupakan outcome dari proses politik transformasi digital yang berhasil dikelola, mencakup percepatan waktu, simplifikasi prosedur, dan peningkatan aksesibilitas

Kerangka berpikir ini menekankan bahwa efisiensi pelayanan administrasi kependudukan bukan semata-mata hasil dari adopsi teknologi, melainkan outcome dari proses politik yang kompleks melibatkan negosiasi antar-aktor, pengelolaan resistensi, kolaborasi multi-level, dan pembangunan legitimasi.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal terbenam (*embedded single-case study*) sebagaimana dikategorikan oleh Yin (2018). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan proses politik dalam transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan secara mendalam, holistik, dan kontekstual.

Karakteristik penelitian kualitatif deskriptif yang relevan dengan penelitian ini meliputi lima hal. Pertama, fokus pada pemahaman proses politik, di mana penelitian ini berupaya memahami dinamika proses politik transformasi digital dari perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk bagaimana keputusan dibuat, bagaimana negosiasi berlangsung, dan bagaimana legitimasi dibangun. Kedua, eksplorasi konteks politik lokal, di mana fenomena Kios Adminduk dipelajari dalam konteks politik alamiahnya tanpa manipulasi eksperimental, memungkinkan pemahaman yang autentik tentang dinamika politik implementasi. Ketiga, deskripsi mendalam (*thick description*), di mana penelitian ini menghasilkan deskripsi yang kaya dan rinci tentang proses politik, strategi pengelolaan resistensi, mekanisme kolaborasi, dan pembangunan legitimasi yang dikembangkan oleh berbagai aktor. Keempat, interpretasi induktif, di mana analisis bergerak dari data spesifik menuju pola dan tema yang lebih umum tentang proses politik, memungkinkan munculnya temuan yang tidak terantisipasi sebelumnya. Kelima, perspektif holistik, di mana proses

politik transformasi digital dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan saling terkait, bukan sebagai variabel-variabel yang terisolasi.

Desain *embedded single-case study* dipilih karena memungkinkan penelitian ini menganalisis satu kasus utama secara mendalam, namun sekaligus menangkap variasi yang terjadi pada unit-unit analisis yang tertanam (*embedded*) di dalamnya. Dalam penelitian ini, kasus utamanya adalah implementasi Kios Adminduk di Kabupaten Jepara, sementara unit-unit analisis yang tertanam di dalamnya adalah enam desa yaitu Kuwasen, Krapyak, Tahunan, Troso, Bandengan, dan Karangrandu, serta dua kecamatan yaitu Kecamatan Jepara dan Kecamatan Pecangaan.

Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi Kios Adminduk tidak berjalan secara seragam di seluruh desa. Setiap unit analisis yang tertanam memperlihatkan dinamika yang berbeda-beda: Desa Kuwasen mengembangkan inovasi protokol layanan berbasis WhatsApp sebagai respons adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur, Desa Krapyak mengalami pemblokiran akses akibat pelanggaran integritas operator yang kemudian menjadi titik uji bagi mekanisme koreksi institusional, sementara Desa Tahunan menunjukkan pola kolaborasi multi-level yang paling solid sebagaimana terbukti dari keberhasilan penanganan kasus kelahiran darurat dalam 1x24 jam. Variasi antar unit analisis inilah yang justru memperkaya analisis dan memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang lebih komprehensif tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi.

Dengan desain *embedded*, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses politik transformasi digital Kios Adminduk berlangsung dan berdampak terhadap efisiensi pelayanan di tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusinya dari berbagai level pemerintahan secara simultan. Pendekatan ini sesuai untuk mengeksplorasi "bagaimana" proses politik transformasi digital terjadi dan "mengapa" beberapa strategi politik berhasil sementara yang lain menghadapi hambatan dalam konteks spesifik Kabupaten Jepara.

1.9.2. Jenis dan Sumber Data

Miles dan Huberman (2020) mengkategorisasi sumber data kualitatif menjadi data utama dan pendukung. Penelitian ini menggunakan kedua kategori tersebut::

A. Data Utama

1. Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan key informants dari berbagai stakeholder untuk menggali pemahaman mendalam tentang proses politik transformasi digital
2. Focus Group Discussion (FGD) dengan operator Kios Adminduk untuk memahami dinamika implementasi di tingkat desa dari perspektif pelaksana

B. Data Pendukung

1. Dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan dan implementasi Kios Adminduk.

2. Laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
3. Artikel jurnal ilmiah tentang transformasi digital dalam pelayanan publik.
4. Publikasi media massa terkait penggunaan Kios Adminduk di Kabupaten Jepara.
5. Data statistik kependudukan dan penggunaan layanan Kios Adminduk.

Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang proses politik di balik implementasi, tantangan yang dihadapi dari sudut pandang politik, dan strategi yang dikembangkan untuk mengatasi hambatan politik dalam transformasi digital Kios Adminduk. Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan triangulasi data dan memperkaya analisis (Creswell & Poth, 2018)..

1.9.3. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan *criteria-based selection* sebagaimana direkomendasikan oleh Miles dan Huberman (2020). Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk merepresentasikan populasi secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui informan yang memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang paling relevan dengan fokus penelitian.

Terdapat tiga kriteria utama yang ditetapkan dalam pemilihan informan. Pertama, keterlibatan langsung dalam proses politik transformasi digital Kios Adminduk, baik sebagai pengambil keputusan, pelaksana program, maupun penerima manfaat. Kedua, akses terhadap informasi yang memadai tentang dinamika pengambilan keputusan, mekanisme kolaborasi, dan pengelolaan tantangan dalam implementasi program. Ketiga, kemampuan merepresentasikan perspektif yang beragam dari berbagai level pemerintahan dan elemen masyarakat sehingga analisis tidak hanya mencerminkan satu sudut pandang.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, informan penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut.

Kategori pertama adalah informan kunci pemerintah yang terdiri dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang SIAK Disdukcapil, koordinator program Kios Adminduk beserta staf teknis IT, serta camat dan staf kecamatan di tiga kecamatan terpilih. Kelompok ini dipilih karena memiliki otoritas kebijakan dan akses informasi tertinggi tentang desain institusional, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi lintas level dalam implementasi program.

Kategori kedua adalah informan operator dan implementer yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa di enam desa implementasi,

serta operator Kios Adminduk dari berbagai desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kelompok ini dipilih karena berposisi sebagai pelaksana di garis terdepan yang menghadapi langsung dinamika politik lokal, tantangan teknis operasional, dan interaksi sehari-hari dengan masyarakat pengguna layanan.

Kategori ketiga adalah informan pengguna layanan yang terdiri dari masyarakat pengguna Kios Adminduk dan tokoh masyarakat di desa-desa terpilih. Kelompok ini dipilih karena merepresentasikan perspektif penerima manfaat yang paling langsung merasakan dampak program, sekaligus memberikan penilaian tentang legitimasi dan kualitas pelayanan dari sudut pandang warga.

Proses pemilihan informan dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi awal, di mana peneliti memetakan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam ekosistem Kios Adminduk berdasarkan kajian dokumen dan informasi awal dari Disdukcapil Kabupaten Jepara. Tahap kedua adalah penentuan desa sampel, di mana enam desa dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan variasi karakteristik implementasi, mencakup desa dengan implementasi yang berjalan baik, desa yang pernah mengalami kendala serius, dan desa yang baru bergabung dalam program. Tahap ketiga adalah pendekatan formal dan informal, di mana peneliti melakukan koordinasi awal dengan pihak Disdukcapil dan kecamatan untuk memperoleh akses ke informan di tingkat desa, sekaligus melakukan kunjungan lapangan untuk membangun rapport dengan informan sebelum wawancara dilakukan.

Jumlah total informan ditetapkan antara 20 hingga 25 orang dengan komposisi yang memastikan keterwakilan berbagai perspektif dalam proses politik transformasi digital. Jumlah final ditentukan oleh prinsip *theoretical saturation*, yaitu kondisi di mana data tambahan dari informan baru tidak lagi memberikan informasi atau perspektif baru yang signifikan terhadap fokus penelitian (Creswell & Poth, 2018). Dalam praktiknya, penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 21 informan yang terdiri dari enam operator Kios Adminduk, empat kepala desa, satu sekretaris desa, dua aparatur kecamatan, tiga tokoh masyarakat, dan lima masyarakat pengguna layanan, dan jumlah tersebut dianggap telah mencapai titik saturasi data karena informan-informan terakhir yang diwawancarai cenderung memberikan informasi yang mengkonfirmasi temuan sebelumnya tanpa menambahkan dimensi baru yang substansial.

1.9.4. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang secara epistemologis bertujuan untuk memahami *bagaimana* dan *mengapa* suatu fenomena terjadi, bukan untuk mengukur *seberapa banyak* atau *seberapa besar*. Oleh karena itu, instrumen wawancara dirancang untuk menggali kedalaman makna, proses, dan dinamika politik di balik implementasi Kios Adminduk, bukan untuk mengumpulkan angka-angka statistik. Terdapat tiga alasan substantif yang mendasari pilihan ini.

1. Fokus penelitian adalah proses politik, bukan output kuantitatif. Pertanyaan penelitian menanyakan *bagaimana*

proses politik berlangsung dan *apa saja* tantangan yang dihadapi. Kedua pertanyaan ini tidak dapat dijawab melalui data angka, melainkan melalui narasi, pengalaman, dan perspektif aktor yang terlibat langsung di lapangan.

2. Data kuantitatif tentang capaian program seperti jumlah dokumen yang diterbitkan, cakupan desa, dan penghematan biaya masyarakat telah tersedia dalam dokumen resmi Disdukcapil Jepara dan digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dengan demikian, tidak ada kekosongan data kuantitatif karena kebutuhan tersebut dipenuhi melalui sumber dokumentasi, bukan instrumen wawancara.
3. Terkait landasan kebijakan, penelitian ini memang tidak menjadikan analisis regulasi sebagai fokus utama karena pendekatan yang digunakan adalah studi kasus empiris tentang proses implementasi di lapangan. Landasan kebijakan seperti Peraturan Daerah dan Pakta Integritas digunakan sebagai konteks analisis, bukan sebagai objek analisis utama. Hal ini konsisten dengan desain *embedded single-case study* yang menekankan pemahaman kontekstual dan mendalam tentang dinamika implementasi di lapangan sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018).

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan best practices dalam penelitian kualitatif (Patton, 2015):

- a. Interview guide semi-terstruktur yang disesuaikan untuk setiap kategori informan dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam
- b. Document analysis matrix untuk analisis sistematis dokumen kebijakan dan kinerja
- c. Audio-visual recording equipment dan tools dokumentasi lainnya

Instrumen-instrumen ini akan digunakan secara fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

1.9.5. Daftar Pertanyaan Penelitian

Tabel 2 Instrumen Pertanyaan untuk Kepala Disdukcapil dan Kabid Terkait

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Technology Enactment (Fountain 2001)			
1	Struktur Institusional	Bagaimana aturan formal dan informal dalam organisasi membentuk implementasi Kios Adminduk?	• Perubahan SOP dan regulasi • Rutinitas organisasi yang berubah • Pembagian kewenangan baru
2	Relasi Kekuasaan	Bagaimana distribusi kontrol atas teknologi dan data kependudukan berubah dengan adanya Kios Adminduk?	• Siapa yang mengendalikan akses sistem? • Perubahan hierarki keputusan • Redistribusi otoritas
3	Kapasitas Organisasional	Bagaimana Disdukcapil membangun kapasitas politik untuk mengimplementasikan inovasi digital ini?	• Alokasi sumber daya • Pembangunan koalisi • Pengelolaan resistensi internal
B. Proses Politik Pengambilan Keputusan			
4	Inisiasi Program	Bagaimana proses politik pengambilan keputusan untuk mengadopsi Kios Adminduk?	• Siapa inisiator? • Aktor yang terlibat? • Pertimbangan politik
5	Negosiasi Anggaran	Bagaimana proses negosiasi anggaran dengan DPRD untuk program ini?	• Strategi lobbying • Resistensi yang dihadapi • Kompromi politik
6	Mobilisasi Dukungan Politik	Bagaimana membangun dukungan politik dari berbagai stakeholder?	• Strategi komunikasi politik • Koalisi pendukung • Champions program
C. Politik Inovasi Digital (Mergel 2016)			
7	Resistensi Birokrasi	Bentuk resistensi apa yang muncul dari internal birokrasi terhadap program ini?	• Siapa yang resisten? • Alasan resistensi • Dampak pada program
8	Strategi Mengelola Resistensi	Bagaimana strategi politik untuk mengatasi resistensi birokrasi?	• Taktik persuasi • Insentif yang diberikan • Sanksi yang diterapkan
9	Pembangunan Legitimasi	Bagaimana membangun legitimasi politik program di mata publik dan stakeholder?	• Strategi komunikasi publik • Demonstrasi hasil • Partisipasi stakeholder
D. Collaborative Governance (Ansell & Gash 2008)			
10	Desain Kolaborasi	Bagaimana mekanisme kolaborasi dengan pemerintah desa dirancang secara politik?	• Aturan main kolaborasi • Pembagian tanggung jawab • Forum koordinasi
11	Kepemimpinan Fasilitatif	Bagaimana peran kepemimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi	• Gaya kepemimpinan • Pengelolaan konflik • Pembangunan konsensus

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
		multi-level?	
12	Dampak Politik terhadap Efisiensi	Bagaimana proses politik yang dilalui berdampak pada efisiensi pelayanan?	• Percepatan waktu • Simplifikasi prosedur • Aksesibilitas layanan

Tabel 3 Instrumen Pertanyaan untuk Koordinator Program dan Staf Teknis IT

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Peran dalam Proses Politik Implementasi			
1	Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan	Bagaimana keterlibatan Anda dalam proses pengambilan keputusan politik terkait program?	• Tingkat keterlibatan • Masukan yang diterima • Keputusan yang diabaikan
2	Posisi dalam Struktur Kekuasaan	Bagaimana posisi koordinator/staf teknis dalam struktur kekuasaan pengambilan keputusan?	• Akses ke pengambil keputusan • Pengaruh yang dimiliki • Keterbatasan kewenangan
B. Technology Enactment dalam Praktik			
3	Negosiasi Desain Sistem	Bagaimana proses negosiasi politik dalam menentukan desain sistem teknologi?	• Kepentingan berbeda • Kompromi teknis-politik • Keputusan final
4	Kontrol atas Teknologi dan Data	Siapa yang memiliki kontrol politik atas sistem dan data kependudukan?	• Akses ke sistem • Kontrol data • Konflik kewenangan
5	Perubahan Relasi Kekuasaan Internal	Bagaimana teknologi digital mengubah relasi kekuasaan internal di Disdukcapil?	• Departemen yang diuntungkan • Yang kehilangan pengaruh • Konflik internal
C. Pengelolaan Resistensi Internal			
6	Resistensi dari Pegawai Disdukcapil	Apakah ada resistensi dari pegawai Disdukcapil terhadap desentralisasi layanan?	• Bentuk resistensi • Alasan resistensi • Pegawai yang resisten
7	Strategi Mengatasi Resistensi Teknis	Bagaimana strategi mengatasi resistensi yang dibungkus sebagai alasan teknis?	• Identifikasi resistensi terselubung • Taktik persuasi • Hasil yang dicapai
D. Koordinasi Politik dengan Stakeholder Teknis			
8	Negosiasi dengan	Bagaimana proses negosiasi politik	• Isu yang

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
	Diskominfo	dengan Diskominfo untuk infrastruktur?	dinegosiasikan • Konflik kepentingan • Kesepakatan yang dicapai
9	Koordinasi dengan Vendor/Penyedia Teknologi	Bagaimana dinamika politik dalam hubungan dengan vendor teknologi?	• Proses pengadaan • Negosiasi kontrak • Isu politik yang muncul
E. Tantangan Politik dalam Implementasi Teknis			
10	Konflik Standarisasi vs Fleksibilitas Lokal	Bagaimana mengelola konflik politik antara standarisasi pusat dan kebutuhan lokal desa?	• Tekanan dari desa • Kebijakan pusat • Kompromi yang diambil
11	Tekanan Politik untuk Percepatan	Apakah ada tekanan politik untuk mempercepat implementasi yang bertentangan dengan kesiapan teknis?	• Sumber tekanan • Dampak pada kualitas • Cara menghadapi
F. Monitoring dan Evaluasi Politik			
12	Pelaporan Kinerja untuk Tujuan Politik	Bagaimana data kinerja program digunakan untuk kepentingan politik?	• Data yang dilaporkan • Pihak yang memanfaatkan • Tekanan untuk "memoles" data
13	Transparansi Data	Bagaimana keputusan politik terkait transparansi data kinerja program?	• Data yang dibuka vs ditutup • Pertimbangan politik • Dampaknya

Tabel 4 Instrumen Pertanyaan untuk Camat dan Staf Kecamatan

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Peran Politik Kecamatan			
1	Posisi Politik Kecamatan	Bagaimana posisi politik kecamatan dalam implementasi Kios Adminduk?	• Peran koordinasi • Kewenangan yang dimiliki • Tantangan politik
2	Hubungan dengan Kabupaten	Bagaimana dinamika politik hubungan dengan Disdukcapil?	• Pola komunikasi • Instruksi vs konsultasi • Ruang manuver
3	Hubungan dengan Desa	Bagaimana kecamatan memfasilitasi proses politik adopsi di desa?	• Pendekatan persuasi • Insentif yang

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
			ditawarkan • Tekanan politik
B. Pengelolaan Konflik Lokal			
4	Konflik Politik di Level Kecamatan	Apakah ada konflik politik terkait program di wilayah kecamatan?	• Jenis konflik • Pihak yang berkonflik • Dampak pada program
5	Strategi Resolusi Konflik	Bagaimana mengelola konflik politik yang muncul?	• Mediasi yang dilakukan • Solusi yang dicapai • Pembelajaran

Tabel 5 Instrumen Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Kondisi Awal Kolaborasi (Ansell & Gash 2008)			
1	Ketimpangan Sumber Daya	Bagaimana ketimpangan sumber daya antara desa dan kabupaten mempengaruhi kolaborasi?	• Kesenjangan kapasitas • Kesenjangan keuangan • Dampak pada posisi tawar
2	Sejarah Kerjasama	Apakah ada pengalaman kerjasama sebelumnya yang mempengaruhi keputusan berkolaborasi?	• Program sebelumnya • Pembelajaran dari masa lalu • Kepercayaan yang terbangun
3	Insentif Berpartisipasi	Apa insentif politik dan non-politik bagi desa untuk mengadopsi program?	• Manfaat politik bagi kepala desa • Tekanan dari atas • Dukungan yang dijanjikan
B. Proses Politik Pengambilan Keputusan di Desa			
4	Proses Keputusan Adopsi	Bagaimana proses politik pengambilan keputusan untuk mengadopsi Kios Admuduk di desa?	• Musyawarah desa • Aktor yang terlibat • Pertimbangan politik lokal
5	Resistensi Lokal	Apakah ada resistensi politik dari elite desa atau masyarakat?	• Siapa yang resisten? • Alasan resistensi • Cara mengatasinya
6	Dukungan Elite Lokal	Bagaimana memobilisasi dukungan elite lokal (tokoh masyarakat, pemuka agama)?	• Strategi persuasi • Peran mereka • Dampaknya

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
C. Proses Kolaboratif (Ansell & Gash 2008)			
7	Dialog dan Negosiasi	Bagaimana proses dialog dan negosiasi dengan Disdukcapil berlangsung?	• Forum dialog • Isu yang dinegosiasikan • Kesepakatan yang dicapai
8	Pembangunan Kepercayaan	Bagaimana kepercayaan antara desa dan Disdukcapil dibangun dalam proses kolaborasi?	• Bukti komitmen • Pengalaman positif • Konsistensi dukungan
9	Komitmen pada Proses	Bagaimana mempertahankan komitmen politik desa terhadap program?	• Tantangan komitmen • Faktor pendukung • Mekanisme akuntabilitas
D. Dampak Politik Lokal			
10	Legitimasi Politik Kepala Desa	Bagaimana program ini mempengaruhi legitimasi politik kepala desa di mata warga?	• Persepsi masyarakat • Dukungan politik • Modal politik
11	Perubahan Relasi Kekuasaan	Bagaimana Kios Adminduk mengubah relasi kekuasaan di desa?	• Peran baru yang muncul • Pergeseran pengaruh • Konflik yang timbul

Tabel 6 Instrumen Pertanyaan untuk Operator Kios Adminduk

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Posisi dalam Struktur Kekuasaan Lokal			
1	Proses Seleksi Operator	Bagaimana proses politik pemilihan operator di desa?	• Kriteria seleksi • Siapa yang memutuskan • Pertimbangan politik
2	Akuntabilitas Ganda	Kepada siapa operator merasa lebih bertanggung jawab secara politik?	• Kepala desa vs Disdukcapil • Konflik akuntabilitas • Penyelesaian konflik
3	Posisi Tawar Operator	Bagaimana posisi tawar operator dalam struktur kekuasaan lokal?	• Dukungan yang diterima • Tekanan yang dihadapi • Ruang otonomi
B. Tantangan Politik Implementasi			
4	Tekanan Politik	Apakah ada tekanan politik dari	• Bentuk tekanan

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
	Lokal	elite lokal terkait pelayanan?	• Permintaan khusus • Cara menghadapi
5	Konflik Kepentingan	Apakah pernah menghadapi konflik kepentingan dalam pelayanan?	• Jenis konflik • Pihak yang terlibat • Solusi yang diambil
C. Dukungan dan Hambatan			
6	Dukungan Politik dari Desa	Bagaimana dukungan politik dari pemerintah desa?	• Bentuk dukungan • Konsistensi dukungan • Perlindungan yang diberikan
7	Dukungan dari Disdukcapil	Bagaimana dukungan politik dan teknis dari Disdukcapil?	• Responsivitas • Komitmen mereka • Ketika ada masalah

Tabel 7 Instrumen Pertanyaan untuk Masyarakat Pengguna

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Persepsi tentang Proses Politik Program			
1	Kesadaran tentang Proses Politik	Apakah Anda mengetahui bagaimana Kios Adminduk bisa hadir di desa?	• Sumber informasi • Pemahaman proses • Aktor yang dikenal
2	Sosialisasi Program	Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang program ini?	• Saluran sosialisasi • Peran elite lokal • Kejelasan informasi
3	Partisipasi dalam Keputusan	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait program di desa?	• Forum partisipasi • Aspirasi yang didengar • Pengaruh masyarakat
B. Legitimasi Politik Program			
4	Kepercayaan terhadap Program	Seberapa besar kepercayaan Anda bahwa program ini untuk kepentingan masyarakat, bukan politik?	• Tingkat kepercayaan • Alasan percaya/tidak percaya • Kecurigaan politik
5	Penilaian terhadap Kepemimpinan	Bagaimana penilaian Anda terhadap peran kepala desa dan pemerintah kabupaten dalam program ini?	• Apresiasi • Kritik • Harapan
C. Pengalaman dengan Relasi Kekuasaan			
6	Akses ke Layanan	Apakah semua warga memiliki akses yang sama ke layanan Kios Adminduk?	• Diskriminasi yang dialami • Perlakuan istimewa • Ketidakadilan
7	Pengaruh Politik dalam Pelayanan	Apakah Anda pernah melihat/mengalami adanya pengaruh politik dalam pelayanan?	• Bentuk pengaruh politik • Pihak yang terlibat • Dampak pada

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
			layanan
D. Dampak Politik Lokal			
8	Perubahan Hubungan dengan Pemerintah Desa	Bagaimana program ini mengubah hubungan Anda dengan pemerintah desa?	• Lebih dekat/jauh • Kepercayaan meningkat/menurun • Alasannya
9	Mobilisasi Politik	Apakah program ini digunakan untuk kepentingan mobilisasi politik (misalnya kampanye)?	• Pengalaman yang dialami • Timing sosialisasi • Pesan politik yang disampaikan
E. Dampak terhadap Efisiensi dari Sudut Pandang Politik			
10	Perbandingan dengan Sistem Lama	Bagaimana perbandingan pelayanan sekarang dengan sebelum ada Kios Adminduk?	• Waktu dan biaya • Kemudahan akses • Kualitas layanan
11	Kepuasan sebagai Bentuk Legitimasi	Seberapa puas Anda dengan layanan Kios Adminduk?	• Aspek yang memuaskan • Aspek yang mengecewakan • Rekomendasi
F. Aspirasi Politik			
12	Saran untuk Perbaikan	Apa saran Anda untuk perbaikan program dari sudut pandang masyarakat?	• Aspek teknis • Aspek politik • Aspek sosial
13	Harapan terhadap Keberlanjutan	Apakah Anda berharap program ini berlanjut dan mengapa?	• Alasan dukungan • Kekhawatiran • Ekspektasi jangka panjang

Tabel 8 Instrumen Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
A. Peran dalam Proses Politik Program			
1	Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan	Bagaimana keterlibatan Anda dalam proses pengambilan keputusan terkait Kios Adminduk di desa?	• Diundang dalam forum? • Dimintai pendapat? • Pengaruh Anda
2	Peran dalam Sosialisasi	Bagaimana peran Anda dalam mensosialisasikan program ke masyarakat?	• Diminta oleh siapa? • Strategi yang digunakan • Efektivitas
3	Mobilisasi Dukungan	Apakah Anda diminta memobilisasi dukungan masyarakat untuk program?	• Oleh siapa? • Cara yang dilakukan • Hasil yang dicapai
B. Perspektif tentang Proses Politik Lokal			
4	Penilaian Transparansi	Bagaimana penilaian Anda	• Keterbukaan

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
		terhadap transparansi proses politik implementasi program?	informasi • Akses ke pengambil keputusan • Akuntabilitas
5	Penilaian Inklusivitas	Apakah proses pengambilan keputusan sudah cukup inklusif melibatkan berbagai elemen masyarakat?	• Siapa yang dilibatkan • Siapa yang diabaikan • Dampaknya
6	Konflik Kepentingan	Apakah Anda melihat adanya konflik kepentingan politik dalam implementasi program?	• Jenis konflik • Pihak yang berkonflik • Penyelesaian
C. Pengaruh terhadap Legitimasi Politik			
7	Dukungan/Resistensi Masyarakat	Bagaimana respons masyarakat ketika Anda mensosialisasikan program?	• Dukungan yang diterima • Resistensi yang muncul • Alasan mereka
8	Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan	Menurut Anda, apa faktor yang paling mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program?	• Faktor kepercayaan • Faktor manfaat • Faktor politik
9	Peran Kepercayaan kepada Elite Lokal	Seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada tokoh masyarakat mempengaruhi adopsi program?	• Pengaruh Anda • Pengaruh tokoh lain • Mekanismenya
D. Dinamika Kekuasaan Lokal			
10	Perubahan Relasi Kekuasaan	Apakah program ini mengubah dinamika kekuasaan atau pengaruh di tingkat desa?	• Siapa yang diuntungkan • Siapa yang dirugikan • Konflik yang timbul
11	Posisi Tokoh Masyarakat	Bagaimana posisi tokoh masyarakat/pemuka agama dalam struktur kekuasaan program?	• Dihormati/diabaikan • Pengaruh yang dimiliki • Harapan Anda
E. Keberpihakan dan Keadilan			
12	Keadilan Akses	Apakah menurut Anda semua kelompok masyarakat memiliki akses yang adil ke layanan?	• Kelompok terpinggirkan • Diskriminasi • Upaya inklusi

No	Dimensi/Indikator	Pertanyaan Utama	Probing
13	Keberpihakan Program	Apakah program ini berpihak pada kepentingan masyarakat atau kepentingan politik tertentu?	• Bukti keberpihakan • Pihak yang diuntungkan • Evaluasi Anda
F. Pembangunan Legitimasi Berbasis Nilai			
14	Kesesuaian dengan Nilai Lokal	Apakah program ini sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat desa?	• Aspek yang sesuai • Aspek yang bertentangan • Adaptasi yang diperlukan
15	Dukungan Moral dan Sosial	Apakah Anda memberikan dukungan moral kepada program ini?	• Alasan dukungan • Syarat dukungan • Batasan dukungan
G. Aspirasi dan Rekomendasi Politik			
16	Pembelajaran Politik	Apa pembelajaran politik dari implementasi program ini?	• Aspek positif • Aspek negatif • Perbaikan yang dibutuhkan
17	Rekomendasi untuk Keberlanjutan	Apa rekomendasi Anda agar program ini berkelanjutan dan legitimate?	• Aspek politik • Aspek sosial • Aspek ekonomi

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada panduan penelitian kualitatif Miles dan Huberman (2020), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi empat metode utama::

1. Wawancara mendalam

Dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi 60-90 menit per informan sebagaimana direkomendasikan Miles dan Huberman (2020). Wawancara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sesuai preferensi informan untuk

memastikan kenyamanan dan kualitas data. Semua wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan verbatim untuk analisis.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan dengan operator Kios Adminduk (8-10 orang) dengan durasi 90-120 menit. FGD memfasilitasi diskusi kelompok untuk mengeksplorasi:

- Pengalaman kolektif dalam implementasi
- Dinamika hubungan dengan stakeholder
- Tantangan bersama dan pembelajaran
- Perspektif bottom-up tentang proses politik

3. Analisis dokumen

Menggunakan pendekatan analisis dokumen sistematis dari Miles dan Huberman (2020), dokumen dianalisis untuk memahami konteks kebijakan, perkembangan implementasi, dan capaian kinerja objektif.

Kombinasi teknik-teknik ini akan memungkinkan triangulasi data, meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Denzin, 2017).

1.9.7. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan Interactive Model of Analysis dari Miles dan Huberman (2020) yang terdiri dari empat komponen yang berlangsung secara simultan:

1. Data Collection (Pengumpulan Data):

Proses pengumpulan data berlangsung iteratif dengan analisis preliminary untuk memandu pengumpulan data selanjutnya dan memastikan *theoretical saturation* tercapai.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Reduksi data dalam penelitian ini fokus pada:

- Identifikasi aktor-aktor kunci dalam proses politik
- Pemetaan kronologi keputusan politik
- Kategorisasi tantangan dan strategi politik
- Identifikasi pola relasi kekuasaan

3. Penyajian Data

Mengorganisasikan informasi dalam bentuk *matrices*, *networks*, *charts*, dan format grafis lainnya yang memudahkan *pattern recognition* dan *conclusion drawing*. Penyajian data meliputi:

- Matriks aktor dan peran politik
- Diagram alur proses pengambilan keputusan
- Timeline implementasi dan peristiwa politik kunci
- Network relasi antar-stakeholder

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Interpretasi makna data dan verifikasi melalui *member checking*, *peer review*, dan triangulasi. Kesimpulan dikembangkan secara iteratif dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian, fokus pada:

- Pola proses politik yang muncul
- Faktor-faktor kunci keberhasilan politik
- Mekanisme pengelolaan resistensi dan konflik
- Model kolaborasi multi-level yang efektif

1.9.8. Teknik Validitas Data

Validitas dalam penelitian kualitatif diestabish melalui multiple strategies sebagaimana direkomendasikan Creswell dan Poth (2018):

1. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber informan untuk memvalidasi temuan tentang proses politik. Informasi dari pengambil keputusan di-silang-periksa dengan perspektif implementor dan penerima dampak kebijakan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik.

2. Triangulasi Metode

Mengombinasikan wawancara, FGD, dan analisis dokumen untuk memvalidasi temuan tentang proses politik melalui

berbagai metode. Konvergensi temuan dari berbagai metode meningkatkan kredibilitas.

3. Pemeriksaan Informan

Verifikasi interpretasi dan temuan dengan informan kunci untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan pemahaman tentang proses politik. Lincoln dan Guba (1985) menyebut ini sebagai "teknik paling krusial untuk menetapkan kredibilitas."

4. Jejak Audit

Mempertahankan catatan rinci keputusan penelitian, prosedur analitis, dan alasan metodologis untuk memungkinkan audit eksternal terhadap proses penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

5. Peer Debriefing

Diskusi berkala dengan peneliti lain atau pembimbing untuk mendiskusikan temuan, interpretasi, dan kesimpulan, memastikan objektivitas dan mengurangi bias peneliti.

Kombinasi teknik ini dirancang untuk memastikan trustworthiness penelitian kualitatif melalui penetapan credibility, transferability, dependability, dan confirmability sebagai kriteria paralel untuk validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif.